I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia karena seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan pun semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Indonesia merupakan negara dengan ketahanan pangan yang tidak stabil. Ketergantungan terhadap beras begitu tinggi sehingga kebijakan mengimpor beras pun terus dilakukan dan juga kebijakan pangan mie yang berbahan dasar terigu menjadi alternatif utama sedangkan terigu merupakan bahan baku yang di impor dikarenakan kurangnya suplai beras dalam negeri. Namun berdasarkan data Susenas (2022), beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, pada Maret 2022 ini konsumsinya sedikit mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Rata-rata konsumsi per kapita sebulan Beras sebanyak 6,66 kg turun sekitar 0,58 persen dimana pada Maret 2021 konsumsinya sebanyak 6,7 kg per kapita sebulan.

Mengingat begitu pentingnya pangan dalam perwujudan ketahanan pangan nasional, maka intervensi pemerintah dalam aspek ini sangat diperlukan. Selama ini kebijakan pemerintah terkait dengan pangan masih terfokus pada komoditas beras. Hal ini berkaitan pula dengan kondisi pola pangan masyarakat saat ini yang sangat didominasi beras menyebabkan komoditas ini berubah menjadi satu-satunya sumber karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang merupakan urusan wajib pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007). Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman. (2) Distribusi pangan, dimana pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan (3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya (Dewan Ketahanan Pangan, 2022).

Pada dasarnya ketahanan sistem pangan memastikan kecukupan dan akses pangan untuk semua orang. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan secara kuantitas dan kualitas dengan akses meliputi akses ekonomi dan fisik (Tendall *et al.*, 2015). Komponen ini mempresentasikan tiga dimensi utama ketahanan pangan yang disampaikan oleh Food Agricultural Organization (FAO) yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Ketahanan pangan sendiri merupakan konsep yang fleksibel yang tercermin dalam banyak penelitian dan penggunaan kebijakan.

Menurut Food and Agricultural Organization (FAO) (2023) menyatakan ketahanan pangan tercipta ketika "semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet mereka serta preferensi pangan

untuk hidup aktif dan sehat." Definisi ini menekankan pentingnya ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Selain itu, FAO juga menyoroti bahwa ketahanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konflik, perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, dan volatilitas harga pangan.

UU No. 18 tahun 2012 menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya rumah tangga petani, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kastanja *et al.* (2020) menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, namun harus melibatkan juga rumah tangga petani secara aktif. Potensi yang besar dari pekarangan dapat mendukung ketahanan pangan rumah tangga, karena dapat menjadi sumber gizi keluarga, sumber pangan dan papan, sumber keanekaragaman tanaman, pengendali iklim mikro, dan menciptakan lingkungan hidup yang optimal.

Menurut Sanggelorang dan Rahman (2019) ketahanan pangan menentukan akses individu terhadap makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga hal ini menjadi penting untuk menentukan individu tersebut dapat hidup aktif dan sehat, sehingga akhirnya ketahanan pangan akan menjamin ketahanan gizi. Oleh karena itu ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan identik dengan ketahanan nasional. Berikut ini adalah alasan penting

mengapa pentingnya ketahanan pangan diakui di seluruh negeri (i) Akses terhadap pangan bergizi cukup bagi seluruh penduduk merupakan bagian dari perwujudan hak asasi manusia, (ii) Pola makan dan asupan gizi yang baik merupakan landasan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, (iii) Ketahanan pangan merupakan hal mendasar bagi ketahanan ekonomi dan bahkan nasional suatu negara yang berdaulat.

Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras, sebagai bahan makanan utama sekaligus sumber nutrisi penting dalam struktur pangan melalui aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Padi dibudidayakan hampir di semua provinsi di Indonesia sepanjang tahun tanpa mengenal musim khususnya untuk lahan sawah dengan irigasi yang bagus. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS tahun 2019 sampai 2021, luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 1,25% per tahun atau menjadi 10,41 juta hektar tahun 2021. Puncak panen di bulan Maret 2021 lebih tinggi 3,89% dibandingkan 2019 yaitu sebesar 1,79 juta ha. Hampir 88% produksi padi di Indonesia disumbang oleh 12 provinsi sentra. Provinsi sentra produksi padi didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang masing masing memberikan kontribusi sebesar 17,91% (setara 9,77 juta ton GKG), 17,57% (9,59 juta ton GKG), 16,63% (9,07 juta ton GKG), dan Sulawesi Selatan sebesar 9,08% (4,95 juta ton GKG).

Selain pemenuhan konsumsi pangan daerah, adanya peningkatan harga pangan yang ekstrim di tingkat dunia mengakibatkan kondisi

ketahanan pangan nasional melemah. Hal tersebut mempengaruhi penduduk miskin di daerah-daerah pedesaan yang umumnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen per atau sebanyak 26,61 juta orang. Baik persentase maupun jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2021 maupun Maret 2020. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 persentase penduduk miskin menurun 0,60 persen poin, sedangkan dibandingkan dengan Maret 2020 penurunannya sebesar 0,24 persen (BPS, 2022). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, penurunan tingkat kemiskinan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perekonomian Indonesia yang tumbuh positif pada triwulan 1/2022. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (y-o-y) perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen. Indikasi daya beli masyarakat yang terus membaik juga terlihat dari inflasi inti yang menguat pada periode Januari-Maret 2022 (BPS, 2022).

Kemiskinan akan mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat, konsumsi pangan merupakan gambaran dari aspek ketersediaan dan kemampuan rumah tangga masyarakat untuk membeli dan memperoleh pangan. Besar kecilnya pendapatan sangat menentukan jenis pangan yang akan dikonsumsi oleh suatu rumah tangga. Jenis pangan yang dikonsumsi rumah tangga masyarakat akan menentukan pola konsumsi rumah tangga tersebut. Pola konsumsi pangan rumah tangga didekati dengan jenis dan

frekuensi makan yang dapat mencerminkan kebiasaan makan dalam rumah tangga tersebut.

Pola konsumsi pangan di satu daerah dengan daerah lain tentunya berbeda. Pola konsumsi masyarakat di desa dan di kota berbeda, karena masyarakat di kota lebih mementingkan kandungan zat gizi makanan dari bahan makanan yang dikonsumsi. Dilihat dari keadaan sosial ekonomi, penduduk kota lebih mampu dalam hal finansial, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan lebih baik, tersedianya tenaga kesehatan, serta lapangan usaha mayoritas penduduk pegawai dan wiraswasta. Sedangkan di desa, pola konsumsi masyarakat kurang memenuhi syarat dilihat dari keadaan sosial ekonomi yang tidak mampu, fasilitas kesehatan yang terbatas, fasilitas pendidikan kurang, tersedianya tenaga kesehatan serta lapangan kerja penduduk mayoritas petani dan buruh (BPS, 2022).

Mayoritas kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki pola pengeluaran makanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran non makanannya, namun di wilayah perkotaan serta wilayah penyangga Kota Surabaya (Kabupaten Gresik dan Sidoarjo) memiliki pola yang sama dengan angka Jawa Timur dimana presentase pengeluaran non makanannya lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Kabupaten dengan pengeluaran perkapita sebulan tertinggi adalah Kota Surabaya dengan nilai 2.445.917 rupiah diikuti Kota Madiun dan Kota Malang masing – masing dengan nilai 2.030.570 rupiah dan 1.989.831 rupiah (BPS, 2024). Kabupaten dengan pengeluaran perkapita sebulan

terendah adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 740.145 rupiah, Kabupaten Bangkalan dengan nilai 809.398 rupiah dan Kabupaten Pamekasan dengan nilai 890.405 rupiah.

Tabel 1.1 Rata – Rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan Penduduk di Madura Menurut Kabupaten Tahun 2022 – 2023 (Rp)

Kabupaten / Kota	2022	2023
Bangkalan	504.885	506.043
Sampang	444.960	456.234
Pamekasan	447.395	502.460
Sumenep	1.000.170	1.052.321

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Tabel diatas menunjukkan rata – rata pengeluaran makanan per kapita sebulan penduduk di Madura menurut Kabupaten tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan, yang mana dalam hal ini salah satu disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Namun dilihat dari seluruh kabupaten yang ada di Madura yang mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi yaitu Kabupaten Bangkalan sebesar 1.158 rupiah. Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang memiliki PDRB paling rendah. Disamping itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan juga terbilang paling rendah bahkan minus, yaitu sebesar -1,12 persen pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen pada tahun 2023 (BPS, 2024). Tiga sektor primer yang menopang struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan. meliputi pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut tumbuh secara alamiah karena adanya dukungan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bangkalan. Namun, besarnya kontribusi dari masing-masing sektor tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi Kabupaten Bangkalan. Hal ini

terlihat jelas dari tingkat kemiskinan yang relatif tinggi yang mempengaruhi pola ketahanan pangan (Bappenas, 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan menurut World Bank dan United Nations (2021) dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan akses terhadap layanan dasar (seperti pendidikan dan kesehatan), penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pembangunan sosial yang inklusif. Upaya global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1, menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 melalui berbagai langkah kolaboratif.

Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menekankan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 – 2020 (Ribuan Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
2015	216,23
2016	205,71
2017	206,53
2018	191,33
2019	186,11
2020	204,00
2021	215,97
2022	196,11

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, pada tahun 2015-2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan kembali mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2022 penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan kembali. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bangkalan masih relatif rendah. Salah satu desa yang menjadi perhatian di Kabupaten Bangkalan yaitu Desa Alaskokon Kecamatan Modung. Desa Alaskokon memiliki pendapatan rumah tangga yang rata – rata rendah sehingga pendapatan berpengaruh sangat besar terhadap pola konsumsi. Pengaruh pendapatan juga di jelaskan dalam teori permintaan, pendapatan seseorang akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Ketika terjadi perubahan pendapatan, maka akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah konsumsi rumah tangga.

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Desa Alaskokon di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, merupakan salah satu desa yang masuk kategori "miskin ekstrem" sesuai dengan data terbaru pada tahun 2024. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai pola konsumsi petani miskin di desa tersebut serta bagaimana ketahanan pangan di desa ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Desa Alaskokon menghadapi tantangan signifikan terkait akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendapatan yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya alam, infrastruktur yang minim, serta perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi produksi pangan lokal. Secara umum, petani miskin di pedesaan seperti Alaskokon lebih rentan terhadap kekurangan pangan dan malnutrisi, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup mereka.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap orang pada setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka guna menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Di Desa Alaskokon, ketahanan pangan terancam karena banyak keluarga yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial-ekonomi secara keseluruhan, di mana ketidakcukupan pangan menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) di wilayah Madura menunjukkan bahwa daerah dengan karakteristik kemiskinan ekstrem sering kali memiliki pola konsumsi pangan yang tidak seimbang. Konsumsi pangan pokok seperti beras mendominasi, sementara konsumsi protein hewani dan sayur-sayuran sangat terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah gizi yang berdampak pada kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Penelitian lain oleh Suroso (2021) di

Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga pangan dan ketergantungan yang tinggi pada sumber pangan lokal yang terbatas turut memperparah situasi ketahanan pangan di daerah miskin.

Selain itu, kajian oleh Wahyuni (2022) mengenai ketahanan pangan di desa miskin menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada akses terhadap pangan, tetapi juga pada kemampuan petani miskin untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Dalam konteks Desa Alaskokon, meskipun desa ini memiliki lahan pertanian, produktivitasnya belum optimal karena keterbatasan teknologi, modal, dan pengetahuan mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi petani miskin Desa Alaskokon dan menilai kondisi ketahanan pangan melalui metode pengeluaran pangsa pangan. Dengan menganalisis pola konsumsi harian, sumber pangan, serta strategi bertahan hidup yang digunakan oleh petani miskin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani miskin di Desa Alaskokon.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Pemerintah, melalui program-program pemberdayaan petani miskin dan

intervensi kebijakan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih konkret dan efektif untuk meningkatkan akses petani miskin terhadap pangan yang lebih beragam dan bergizi, sehingga ketahanan pangan di desa-desa miskin seperti Alaskokon dapat tercapai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ketahanan pangan dengan judul “Analisis Pola Konsumsi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Miskin Ekstrim Di Desa Alaskokon Modung Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola konsumsi pangan rumah tangga petani miskin ekstrim di Desa Alaskokon Modung Bangkalan?
2. Bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani miskin ekstrim metode pangsa pengeluaran pangan di Desa Alaskokon Modung Bangkalan?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani miskin ekstrim di Desa Alaskokon Modung Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pola konsumsi pangan rumah tangga petani miskin ekstrim di Desa Alaskokon Modung Bangkalan.
2. Untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani miskin ekstrim metode pangsa pengeluaran pangan di Desa Alaskokon Modung Bangkalan.
3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani miskin ekstrim di Desa Alaskokon Modung Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang berkenaan dengan ketahanan pangan membantu dalam memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Agribisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempraktikkan teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah agar dapat melakukan observasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik.

b. Bagi Lembaga

Untuk menambah pustaka perpustakaan bagi UPN “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Pertanian Pasca Sarjana jurusan Magister Agribisnis pada khususnya.

c. Bagi Dinas / Instansi dan Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan tentang ketahanan pangan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan dan ketahanan pangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian tentang Analisis Pola Konsumsi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Miskin Ekstrim di Desa Alaskokon Modung Bangkalan ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan seperti berbeda dari lokasi, metode analisis data, jumlah dan posisi variabel yang digunakan.